



**BANK
MUAMALAT HARKAT**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



2024

LAPORAN

TRANSPARANSI

PENERAPAN

TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan	:	31 Desember 2024
Alamat	:	Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma
Nomor Telepon	:	0736-7311407
Penjelasan Umum	:	

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola adalah dokumen yang wajib disusun oleh BPRS Muamalat Harkat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas penerapan tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasional, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam memastikan bahwa BPRS Muamalat Harkat dikelola berdasarkan prinsip - prinsip tata kelola dan sesuai prinsip syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait baik intern maupun ekstern.

BPRS Muamalat Harkat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam penerapan tata Kelola disetiap jenjang bagian pada BPRS Muamalat Harkat, secara singkat kami uraikan prinsip - prinsip dalam penerapan tata Kelola sebagai berikut :

- 1.Keterbukaan (transparency) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
- 2.Akuntabilitas (accountability) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban
- 3.Tanggung jawab (responsibility) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
- 4.Independensi (independency) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
- 5.Kewajaran (fairness) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

Penerapan tata Kelola bagi BPRS paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4.Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
- 5.Penanganan benturan kepentingan
- 6.Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
- 7.Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern.
- 8.Batas maksimum penyaluran dana
- 9.Rencana bisnis BPRS

Laporan yang kami sajikan Adalah laporan transparansi penerapan tata Kelola (GCG) tahun 2025 PT BPRS Muamalat Harkat dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan tata kelola PT BPRS Muamalat Harkat Posisi 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, - Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	- Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, - Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, - Wajib mencegah direksi bank utk tdk menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan, - Mamantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, - wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada dirut dengan tembusan kepada dekom.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris : Direksi sudah meninjau kembali posisi staf ahli dan sudah tidak termasuk bagian dalam bank, Direksi sudah berupaya meningkatkan pencapaian RBB tahun 2024, Direksi berupaya melengkapi kebijakan2 berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah, Direksi akan memenuhi seluruh persyaratan sebelum operasional gedung baru, Direksi selalu mewaspadaai seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi memiliki kaitan tindak APU PPT & PPPSPM.

Keterangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan DPS : Bank akan membuat SK UPZ yang baru, Bank akan menyempurnakan SOP pembiayaan mengenai droping secara bertahap agar tidak menimbulkan multi tafsir, Direksi juga sudah menyusun SOP pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo dan sudah mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan DPS sesuai dengan hasil rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Komisaris Utama	- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Komisaris	- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.

Rekomendasi kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Rekomendasi Kepada Direksi : 1. Bank perlu meninjau kembali posisi Staf Ahli Dewan Komisaris 2. Direksi perlu mencari langkah untuk menurunkan NPF 3. Direksi harus mencermati dan mendalami lagi persyaratan maupun SOP pembiayaan sindikasi dan pembiayaan melalui fintech. 4. Memberhentikan Staf Ahli Komisaris 5. Direksi perlu mencermati lagi bagian2 koreksi oleh Auditor Independen 6. Persiapan yang matang saat menjelang pelaksanaan RUPS tahunan 7. Dalam menentukan jumlah anggota DPS Bank perlu mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. 8. Direksi perlu mengevaluasi kembali target dan kinerja Bank 9. Tetap melakukan penagihan dan berkomunikasi dengan nasabah secara lebih intensif terhadap 30 nasabah prioritas penyelesaian pembiayaan bermasalah 10. Direksi perlu menunjuk konsultan untuk mengaudit perkembangan pembangunan gedung kantor baru 11. Selalu memastikan setiap kegiatan usaha bank mengikuti pedoman tata kerja dan SOP yang berlaku 12. Direksi perlu menjadwalkan rapat khusus untuk membahas RBB 2025 13. Penetapan honor anggota DPS yang baru harus mengikuti ketentuan 14. Direksi perlu mencermati dengan matang mengenai segala aturan dan risiko yang ada pada pelaksanaan produk baru 15. Direksi perlu memperhatikan efisiensi kinerja Bank 16. Direksi akan memperbaharui SOP Tata Tertib Pengurus BPRS 17. Memastikan kegiatan usaha bank mengikuti SOP 18. Direksi dapat mengimplementasikan dan menjalankan RBB 2025 19. Bank harus selalu menjalin komunikasi dengan nasabah yang sudah lunas maupun dengan nasabah yang masih bermasalah 20. Direksi dapat memantau pemenuhan segala persyaratan sebelum operasional gedung baru 21. Direksi harus selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan uji coba produk lanjutan baru agar tdk menimbulkan kerugian sebelum produk baru tersebut dilaksanakan 22. Direksi harus selalu mewaspadaai seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi memiliki kaitan tindak APU PPT & PPPSPM

Keterangan

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat dekom dari semester satu dan semester dua tahun 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	(1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. (2) DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran (6) DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	Anggota DPS	<p>(1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. (2) DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran (6) DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.</p>
---	----------------------------	-------------	--

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi : 1. Bank perlu melengkapi SOP pembiayaan Ijarah Multijasa 2. Bank perlu mengurus Kembali Izin Operasional UPZ BMH 3. Bank diminta mempersiapkan calon anggota DPS 4. Bank boleh melakukan droping bertahap kepada nasabah dalam rangka kehati-hatian dan mengambil ujuh bulanan secara full berdasarkan jumlah pembiayaan yang ada sesuai dengan akad perjanjiannya. 5. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan OJK sesuai dengan hasil rapat 6. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan OJK sesuai dengan hasil rapat. 7. DPS memberikan saran agar membuat perjanjian/akad Ju'alah secara tertulis apabila membuat kerjasama dengan agen funding dalam hal penghimpunan dana dan membuat kebijakan terkait aktivitas tersebut 8. Berdasarkan hasil sharing DPS kepada DSN MUI terkait pembayaran ujuh/fee 1 persen tersebut maka bank boleh memberikan fee/ujroh itu dengan ketentuan bahwa sumber dananya adalah dari biaya marketing atau biaya relasi atau biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Agar membuat SOP sesuai dengan format dan ketentuan yang ada, DPS menyarankan kepada direksi untuk membuat SOP Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) secara terpisah 10. DPS terus berkomitmen dalam melaksanakan segala peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut 11. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan DPS sesuai dengan hasil rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
195/01/BMH/VII/2024	16-07-2024	14/01/BMH/I/2025	20-01-2025

Keterangan

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat DPS pada semester satu & dua tahun 2024

|

|

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan				

Keterangan

BPRS Muamalat Harkat belum memiliki program kerja komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	53.000,000	0.76	NIHIL	0.00
2	Deri Haspriyanti, SE	0	0.00	-	0.00

Keterangan

Satu direksi (Direktur Utama) yang mempunyai kepemilikan saham pada BPRS Muamalat Harkat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Direktur utama mempunyai hubungan keuangan sebagai salah satu pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Nihil
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

keluarga direksi BPRS Muamalat Harkat tidak menjadi anggota direksi lain, anggota dewan komisaris atau pemegang saham pada BPRS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	103,000,000	1.47 -		0.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	225,000,000	3.21 -		0.00

Keterangan

Anggota dewan komisaris PT BPRS muamalat Harkat merupakan pemegang saham

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Yefriza, SE. MPPM.Ph.D - Pemegang Saham
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	Andi Novianza Wirajati, ST - Pemegang Saham

Keterangan

Anggota dekom sebagai pemegang saham pada BPRS, dan tidak sebagai anggota direksi atau dekom pada perusahaan lainnya.

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Drs. H. Razie Jachya - Ayah kandung, Hj. Djalalih
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	H. Iskandar Ramis, SIP.M.Si - Bapak Kandung

Keterangan

Keluarga anggota dewan komisaris memiliki hubungan sebagai pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil

Keterangan

Dewan komisaris tidak merangkap jabatan pada BPRS/Lembaga/Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	Nihil	Nihil

Keterangan

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat merangkap jabatan sebagai DPS BPRS MDSN (Maslahat Dana Syariah Nusantara) Kota Bengkulu sedangkan anggota DPS PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan pada LKS manapun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	504,000,000.00	2	160,800,000.00	2	40,320,000.00
2.	Tunjangan	2	110,887,132.00	2	15,875,000.00	2	2,880,000.00
3.	Tantiem	2	266,236,100.00	2	122,877,200.00	2	20,479,700.00
4.	Bonus	2	0.00	2	0.00	2	0.00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	13,250,000.00	2	82,000,000.00	2	0.00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	348,505,672.00	2	13,400,000.00	2	2,880,000.00
	Total Remunerasi		1,242,878,904.00		394,952,200.00		66,559,700.00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0.00	2	0.00	2	0.00
2.	Transportasi	2	35,934,000.00	2	0.00	2	0.00
3.	Kesehatan	2	14,400,000.00	2	0.00	2	0.00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0.00	2	0.00	2	603,200.00
	Total Fasilitas Lain		50,334,000.00		0.00		603,200.00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1,293,212,904.00		394,952,200.00		67,162,900.00

Keterangan

Paket atau kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1.33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2.19
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah	6.00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2.81
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3.21

Keterangan

Gaji karyawan ditetapkan dengan SK direksi, sedangkan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS. Perhitungan rasio perbandingan gaji dapat dilihat pada tabel diatas, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap pada PT BPRS Muamalat Harkat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	15-01-2024		2 1. Evaluasi tindak lanjut KHP umum OJK mengenai posisi staf ahli Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kinerja Bank per Desember 2023 3. Pembahasan mengenai RBB 2024
2	04-03-2024		2 1. Evaluasi lanjutan tindak lanjut KHP Umum OJK mengenai posisi staf ahli Dewan Komisaris 2. Evaluasi Laporan Auditor Independen
3	02-04-2024		3 1. Pembahasan mengenai persiapan RUPS tanggal 03 April 2024 2. Pembahasan mengenai laporan pengawasan Dewan komisaris yang akan disampaikan dalam acara RUPS
4	02-08-2024		2 Pembahasan mengenai calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan ditetapkan dalam RULBPS
5	26-08-2024		2 1. Evaluasi kinerja Bank per Juli 2024 dan perbandingannya secara year on year dengan bulan Juli 2023 2. Pembahasan mengenai action plan penyelesaian pembiayaan bermasalah 3. Pembahasan mengenai perkembangan gedung kantor baru 4. Evaluasi Laporan Audit Internal per Agustus 2024 5. Rencana pembahasan RBB 2025 6. Pembahasan mengenai honor anggota DPS 7. Pembahasan mengenai uji coba terbatas kerjasama Fintech
6	26-11-2024		2 1. Evaluasi kinerja Bank per September 2024 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan September 2023 2. Pembahasan mengenai pembaharuan pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris 3. Evaluasi Laporan Audit Internal per Oktober 2024
7	10-12-2024		2 1. Pembahasan dan Persetujuan RBB 2025 PT. BPRS Muamalat Harkat 2. Pembahasan lanjutan mengenai action plan penyelesaian pembiayaan bermasalah 3. Pembahasan lanjutan mengenai perkembangan gedung kantor baru 4. Pembahasan lanjutan mengenai uji coba terbatas kerjasama Fintech 5. Laporan pelaksanaan APU PPT & PPPSPM

Keterangan

Rapat dihadiri oleh komisaris utama (Yefriza) dan anggota komisaris (Andi Novianza Wirajati).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	7	0	100.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	7	0	100.00

Keterangan

Rapat dihadiri secara fisik oleh kedua dekom

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-01-2024	4	1. Pembahasan hasil pengawasan semester II tahun 2023 dan persiapan laporan DPS ke OJK 2. Pembahasan pembiayaan Ijarah Multijasa Umrah 3. Pembiayaan sindikasi dan fintech syariah
2	21-03-2024	4	1. Pembahasan UPZ dan program kerjanya 2. Legalitas UPZ BMH yang sudah habis masa berlaku
3	01-04-2024	20	1. Laporan pertanggungjawaban kinerja DPS 2. Pembahasan calon anggota DPS 3. Pembahasan keunggulan bank syariah dan produk qordh pinjaman murni.
4	26-04-2024	4	1. Pembahasan droping bertahap pembiayaan murabahah perumahan dalam pandangan syariah 2. Kebolehan mengambil ujuh bulanan secara full 3. Perbaikan akad murabahah, objek akad dan konsisten dalam penulisan perjanjian/akad
5	14-06-2024	12	1. Pembahasan hasil pengawasan OJK terhadap produk dan aktivitas BMH 2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan komitmen pihak BMH
6	24-09-2024	3	1. Diskusi antara DPS dan Direksi perihal kebolehan BPRS memberikan ujuh/fee 1 persen kepada orang atau lembaga yang berhasil mencarikan deposito untuk BPRS Muamalat Harkat 2. Pembuatan Opini Syariah oleh DPS terkait hal ini
7	22-10-2024	3	1. Diskusi antara DPS dan Syafri selaku Kabag Pemasaran dan Pembiayaan PT. BPRS Muamalat Harkat tentang SOP pelunasan pembiayaan. 2. Diskusi lanjutan perihal tersebut internal DPS dan penerbitan Opini Syariah. berdasarkan hasil kaji ulang DPS terhadap isi SOP Potongan Pelunasan Pembiayaan tersebut. 3. Sosialisasi materi pra-ijtima dan ijtima sanawi DSN-MUI 2024 antara Ketua dan Anggota DPS.
8	26-11-2024	4	1. Diskusi perihal perpanjangan SK UPZ PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 2. Diskusi lanjutan internal DPS tentang hal ini dan penerbitan opini syariah
9	16-12-2024	2	Sosialisasi dan Diskusi internal DPS tentang: POJK Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah Nomor 25 Tahun 2024.
10	31-12-2024	6	1. Diskusi tentang Hasil pengawasan, pemeriksaan serta temuan DPS semester II 2024 dan tindaklanjutnya. 2 Pembuatan Risalah Rapat Internal DPS

Keterangan

Sesuai dengan POJK No 25 tahun 2024 Rapat DPS wajib dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan, dan DPS BPRS Muamalat Harkat sudah memenuhi kewajibannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	10	0	100.00
2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	5	0	50.00

Keterangan

Jumlah DPS BPRS Muamalat Harkat sudah memenuhi syarat minimal dua (2) pada bln Oktober 2024, sehingga anggota DPS yang baru hanya bisa menghadiri rapat DPS sebanyak 50 persen dari keseluruhan rapat pada tahun 2024

Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Dari Januari sampai dengan Desember 2024 tidak ditemukan Fraud dari anggota Direksi, Dekom , pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Tidak ada permasalahan hukum (pidana/perdata) pada periode laporan tahun sebelumnya dan periode tahun laporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPRS Muamalat Harkat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	06-02-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 1	Karyawan (Yuliani)	50,000
2	22-02-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 2	Orang Tua Karyawan (Fendy eko wijaya)	200,000
3	27-02-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 3	Anak Karyawan (Yaman)	200,000
4	14-03-2024	Kegiatan Sosial	Bantuan acara buka puasa bersama	Panitia Masjid Raya	2,500,000
5	19-03-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 4	Karyawan (Azwa)	50,000
6	25-03-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 5	Anak Karyawan (Wiknu)	150,000
7	17-04-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 6	Anak Karyawan (Sukma)	200,000
8	14-06-2024	Kegiatan Sosial	Bantuan Qurban	Warga sekitar Kantor Pusat Muamalat Harkat	8,900,000
9	23-07-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 7	Anak Karyawan (Sukma)	200,000
10	21-08-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 8	Karyawan (Harry Muharamon)	50,000
11	26-08-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 9	Karyawan (Harry Muharamon)	200,000
12	11-09-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 10	Anak Karyawan (Wiknu)	200,000
13	12-09-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 11	Orang Tua Karyawan (Novi Dahliyah)	200,000
14	10-10-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 12	Istri Karyawan (Tafid Akbar)	200,000
15	28-10-2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 13	Karyawan (Tafid Akbar)	50,000

Keterangan

Tidak ada kegiatan yang mengandung politik pada BPRS Muamalat Harkat



Nama BPRS	: PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Periode Laporan	: 31-12-2024
Alamat	: Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma
Nomor Telepon	: 0736-7311407
Modal Inti	: 9,633,774,006.00
Total Aset	: 86,126,338,933.00
Bobot Faktor	: B
Status Audit Ekstern	: Tidak Diaudit
Nilai Komposit	: 2.1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	0.80	0.20	2.00	0.40	Kelamáhannya : Direksi masih perlu mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku agar kedepannya bank lebih baik lagi. Kelebihannya : Direksi sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dapat tumbuh dan sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.00	0.85	0.20	2.05	0.31	Kelemahannya : Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya. Kelebihannya : Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK dan sudah memberikan masukan/opini untuk perbaikan bank kedepannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.00	0.80	0.20	2.00	0.20	Kelamáhannya : DPS masih perlu meningkatkan pengetahuan demi demi kemajuan bank kedepannya. Kelebihannya : DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bank belum memiliki Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.50	0.80	0.25	2.55	0.19	Kelemahannya : Bank belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah, terbukti masih ditemukannya hal-hal yang mesti diperbaiki dari laporan/Opini DPS. Kelebihannya : Bank berupaya memperbaiki kesalahan dan memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip syariah agar kedepannya bisa lebih baik lagi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	kelemahannya : Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini. Kelebihannya : Apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan bank.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	1.00	0.87	0.23	2.10	0.16	Kelemahannya : FE kepatuhan masih perlu belajar dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku Kelebihannya : FE Kepatuhan berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang diikuti.
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.10	0.90	0.20	2.20	0.17	Kelemahannya : FE Audit Intern masih belum memahami ketentuan dan peraturan secara sempurna kelebihannya : FE Audit Intern berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan -pelatihan yang diikuti.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.05	Kelemahannya : Fungsi Audit Ekstern belum berlangsung sempurna karena pada saat pemeriksaan masih memerlukan informasi tentang produk syariah Kelebihannya : Hasil penilaian dari KAP transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	1.00	1.03	0.20	2.23	0.17	Kelemahannya : Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif Kelebihannya : Dengan mulai diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Kelemahannya : Belum ditemukan kelemahan pada BMPD. Kelebihannya : BPRS sudah memiliki SOP BMPD yang bisa dijadikan pedoman dalam kegiatan pemberian kredit dan belum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap ketentuan BMPD sesuai dengan peraturan berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Kelemahannya : Masih ditemukan target - target yang belum tercapai sesuai dengan rencana bank, Kelebihannya : Dari RBB bank belajar melihat naik turunnya pertumbuhan bank dari tahun ketahun apakah sudah terealisasi atau belum rencana yang dibuat, merupakan pemicu agar bank terus berkembang dan lebih baik kedepannya.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.50	0.80	0.20	2.50	0.13	Kelemahannya : Masih belum memiliki daya tarik yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para nasabah penabung maupun pembiayaan terbukti belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap produk kami Kelebihannya : Bank selalu berusaha terbuka terhadap kondisi keuangan dan non keuangan dengan mempublikasikannya ke media elektronik (website) maupun non elektronik (brosur, spanduk, media masa dll)
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620052
Nama BPRS : P T BPRS MUAMALAT HARKAT
Jenis BPRS : BPRS B (Modal inti < 50.000.000.000)
Tahun Laporan : Lap. Semester II Tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.13	2
Analisis	
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p>	

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)